



Edisi 6

BUNGA RAMPAI

FISIP-UT



Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15418
Tel. +62.021.7490941
Fax. +62.021.7490147
www.ut.ac.id

2009



Edisi 6

BUNGA RAMPAI

FISIP-UT

2009

Hak Cipta © pada Penulis dan Dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Penerbit Universitas Terbuka
Departemen Pendidikan Nasional
Kotak Pos 6666 – Jakarta 10001
Indonesia

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini
dalam bentuk apa pun, tanpa izin dari penerbit

Edisi Ke-6
Cetakan Pertama, Agustus 2009

Penulis : Tim Penulis FISIP-UT

Penelaah Materi : Tim Penulis FISIP-UT

Desain Cover & Ilustrator : Sunarti
Layouter : Eddy Purnomo

350
BUN

BUNGA Rampai/Tim Penulis FISIP-UT-2009
Edisi Keenam, Cetakan pertama, Jakarta,
Universitas Terbuka, 2009
310 hal; ill; 21 cm
ISBN: 978-979-011-465-4

1. bunga rampai
Tim Penulis FISIP-UT-2009



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan ridho-Nya jualah buku Bunga Rampai FISIP-UT edisi ke-6 dapat terbit. Buku Bunga Rampai ini seharusnya terbit satu tahun dua kali, namun karena adanya pergantian kepengurusan Bunga Rampai maka edisi ke-6 ini mengalami keterlambatan dalam penerbitannya.

Kumpulan tulisan ini adalah hasil kajian staf edukatif yang telah diseminarkan dalam seminar akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT. Berbagai tema yang menjadi bidang kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dibahas dalam seminar tersebut, baik kajian yang bersifat teoritik maupun yang bersifat praktik. Berbagai tema dari artikel yang diterbitkan pada edisi ini, diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi dosen, mahasiswa, dan alumni FISIP-UT saja, tetapi juga bagi masyarakat luas yang tertarik dengan bidang kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kehadiran buku Bunga Rampai FISIP-UT ini merupakan hasil kerja tim yang cukup solid dan baik sehingga dapat mewujudkan Buku Bunga Rampai ini. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas semua jerih payah yang telah diberikan oleh tim ini. Meskipun demikian, seperti kata pepatah: "Tiada gading yang tak retak" buku Bunga Rampai FISIP edisi ke-6 ini tentu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran dari para pembaca sangatlah kami harapkan.

Agustus, 2009

Dekan FISIP-UT

Tri Darmayanti
NIP 131866177

Daftar Isi

Kata Pengantar

Nama Penulis Bunga Rampai

| | |
|--|-----|
| <i>Fluency Vs Accuracy</i> dalam Berbicara Bahasa Inggris (Siti Era Mardiani) | 1 |
| Dilema Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Suryarama) | 17 |
| <i>Market Segmentation</i> Dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Agus Santosa) | 33 |
| Pasar Tradisional Yang Semakin Tergusur (Parwitaningsih) | 39 |
| Viktimisasi, Sistem Peradilan Pidana, serta Restitusi dan/atau Hak Bagi Korban Kejahatan (Boedhi Oetojo) | 59 |
| Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Dalam Organisasi Pemerintah (Darmanto) | 83 |
| Ilmu Pemerintahan Relevansinya dengan Ilmu-ilmu lainnya (Prospektif Dalam Mengembangkan Jurusan di FISIP – UT) (Zainul Ittihad Amin) | 95 |
| Kebijakan Pengisian Jabatan Sekdes Dari PNS: Permasalahan dan Solusinya (Enceng) | 103 |
| Penataan Organisasi Pemerintah Daerah (Ayi Karyana) | 119 |
| Pengaruh Media Terhadap Politik dan Pengaruh Politik Terhadap Media (Kasus David Kelly dan BBC di Inggris) (Made Yudhi Setiani) | 139 |
| Praktik Reformasi Administrasi di Beberapa Negara (Kasus China, Amerika Serikat, Indonesia, dan Thailand) (F. Ratih Wulandari) | 151 |

Feminisme dalam Demokrasi (Susanti)

161

Kajian Tentang Peningkatan Peran KORPRI dan Dharma Wanita Universitas Terbuka (Lilik Aslichati)

173

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pemberitaan Pers (*Gender Hororgraphy*) (Ace Sriati Rachman)

187

Paradigma Baru Pola Asuh Anak: Membesarkan Anak dengan Kasih Sayang (Murni Rachmatini)

205

Menunggu Mutu Pelayanan Kelas Dunia PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia (Agus Priyanto)

217

Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Pesan Singkat (SMS) dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh (Haryanto)

231

Paradigma *New Public Management* dan *New Public Service* dalam Manajemen Pelayanan Publik (F. Ratih Wulandari)

255

Pengaruh Kemampuan dan Perilaku Aparatur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi pada Puskesmas-Puskesmas Kabupaten Tangerang) (Liestyodono B. Irianto)

267

Persepsi Masyarakat tentang Layanan Puskesmas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (Darmanto)

287

Friksi dalam Tubuh Partai (Susanti)

297

Nama Penulis Bunga Rampai

| Nama | Judul Makalah | Penyunting | Kelompok |
|---------------------|--|----------------------|------------------------------------|
| Siti Era Mardiani | <i>Fluency Vs Accuracy</i> dalam Berbicara Bahasa Inggris | Joko Rahardjo | Bahasa |
| Suryarama | Dilema Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia | Tiesnawati W | HAM, Kriminologi & Sosiologi |
| Agus Santosa | <i>Market Segmentation</i> Dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG | Tiesnawati W | HAM, Kriminologi & Sosiologi |
| Parwitaningsih | Pasar Tradisional Yang Semakin Tergusur | Agus Santosa | HAM, Kriminologi & Sosiologi |
| Boedhi Oetoyo | Viktimisasi, Sistem Peradilan Pidana, serta Restitusi dan/atau Hak Bagi Korban Kejahatan | Mohamad Husni Arifin | HAM, Kriminologi & Sosiologi |
| Darmanto | Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Dalam Organisasi Pemerintah | Ida Royandiyah | Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik |
| Zainul Ittihad Amin | Ilmu Pemerintahan Relevansinya dengan Ilmu-ilmu lainnya (Prospektif Dalam Mengembangkan Jurusan di FISIP – UT) | Djoko Rahardjo | Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik |
| Enceng | Kebijakan Pengisian Jabatan Sekdes Dari PNS: Permasalahan dan Solusinya | Ari Yuliana | Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik |
| Ayi Karyana | Penataan Organisasi Pemerintah Daerah | Enceng | Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik |
| Made Yudhi Setiani | Pengaruh Media Terhadap Politik dan Pengaruh Politik Terhadap Media (Kasus David Kelly dan BBC di Inggris) | Ida Royandiyah | Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik |

| Nama | Judul Makalah | Penyunting | Kelompok |
|------------------------|---|----------------------|------------------------------------|
| F. Ratih Wulandari | Praktik Reformasi Administrasi di Beberapa Negara (Kasus China, Amerika Serikat, Indonesia, dan Thailand) | Meita Istianda | Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik |
| Susanti | Feminisme dalam Demokrasi | Siti Aisyah | Masalah Gender |
| Lilik Aslichati | Kajian Tentang Peningkatan Peran KORPRI dan Dharma Wanita Universitas Terbuka | Meita Istianda | Masalah Gender |
| Ace Sriati Rachman | Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pemberitaan Pers (<i>Gender Hororgraphy</i>) | Mohamad Husni Arifin | Masalah Gender |
| Murni Rachmatini | Paradigma Baru Pola Asuh Anak: Membesarkan Anak dengan Kasih Sayang | Rosa Tosaini | Masalah Gender |
| Agus Priyanto | Menunggu Mutu Pelayanan Kelas Dunia PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia | Agus Santosa | Pelayanan Publik |
| Haryanto | Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Pesan Singkat (SMS) dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh | Enceng | Pelayanan Publik |
| F. Ratih Wulandari | <i>Paradigma New Public Management dan New Public Service</i> dalam Manajemen Pelayanan Publik | Agus S. | Pelayanan Publik |
| Liestyodono B. Irianto | Pengaruh Kemampuan dan Perilaku Aparatur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi pada Puskesmas-Puskesmas Kabupaten Tangerang) | Ari Yuliana | Pelayanan Publik |
| Darmanto, dkk | Persepsi Masyarakat tentang Layanan Puskesmas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat | Rosa Tosaini | Pelayanan Publik |
| Susanti | Friksi dalam Tubuh Partai | Siti Aisyah | Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik |

Feminisme dalam Demokrasi pada Masa Transisi

Dra. Susanti, M.Si

Penyunting: Dra. Siti Aisyah, M.Si

A. PENDAHULUAN

Akhir abad ke-20 ditandai dengan banyaknya rezim otoriter yang jatuh, sebagai contoh: pecahnya Uni Soviet, jatuhnya rezim Soeharto di Indonesia, dan jatuhnya rezim otoriter di beberapa negara Amerika Latin. Kecenderungan ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal. Kejatuhan sebuah rezim selanjutnya akan membawa negara itu ke dalam masa transisi yang di dalamnya penuh ketidakpastian. Dalam masa ketidakpastian ini, sering kali persoalan gender diabaikan penguasa dalam pembuatan kebijakan. Feminisme sebagai gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak penuh antara laki-laki dan perempuan senantiasa berjalan berkorelasi positif dengan proses demokratisasi.

Secara fakta sering kali kita memperhatikan bahwa kejatuhan suatu rezim seperti ini tidak ada kaitannya dengan perjuangan keadilan gender. Namun, bila hal ini dikaji lebih mendalam, sebenarnya hal ini sangat erat kaitannya. Berbicara tentang demokrasi kalau tidak membahas tentang perempuan maka tidak akan ada artinya. Mengapa? Perempuan memang secara kuantitatif adalah $\frac{3}{4}$ dari populasi, namun hanya $\frac{1}{4}$ saja yang *powerful*. Makalah ini akan menjelaskan bagaimana fenomena gerakan perempuan (feminisme) untuk memperjuangkan keadilan gender dalam kerangka demokrasi pada masa transisi, yaitu peralihan suatu negara dari sistem demokrasi yang cenderung otoritarian ke demokrasi liberal.

B. KERANGKA TEORI

Samuel P. Huntington (1991), mendefinisikan demokrasi sebagai berikut. *Pertama*, demokrasi itu sebenarnya bersifat *liberte*, *egalite*, dan *fraternite*. *Kedua*, adanya pembatasan kekuasaan. *Ketiga*, adanya stabilitas sistem politik yang mendukung proses demokrasi. *Keempat*, adanya

dikotomi antara demokrasi-nondemokrasi dengan indikator: ada kejujuran dalam pemilu, pembatasan jumlah parpol, dan kebebasan pers. *Kelima*, Rezim nondemokratis tidak memiliki sistem pemilu yang kompetitif dan partisipasi voting yang menyeluruh.

David Potter (2001), menekankan adanya proses politik dan inisiatif elit dalam melakukan pilihan-pilihan untuk mengubah *authoritarian rule* ke demokrasi liberal. Selama masa transisi bila *softliners* dan moderat berkuasa di legislatif, sementara *hardliners* berkuasa di eksekutif maka transisi bisa berjalan cukup aman. Dalam hal ini Potter membagi aktor politik selama transisi menjadi dua, yaitu: *Authoritarian Coalition* (yang terdiri dari *hardliners* dan *softliners*) dan *Opposition* (yang terdiri dari *opportunists*, *moderates*, dan *radicals*). Masalahnya kelompok moderat tidak bersatu, sementara *opportunist* tidak mendapat suara. Lancar tidaknya perjalanan demokrasi tergantung pada elit, yaitu bagaimana elit dapat melakukan negosiasi dengan *softliners*. Pembahasan tentang proses politik ini tentunya akan memberi pengaruh pada kedudukan perempuan.

Berkaitan dengan masalah gender, pembagian antara sektor publik dan privat menurut Anne Phillips (1991) justru memarginalkan perempuan. Sebab unit analisis terkecil sektor privat adalah keluarga, faktanya di dalam keluarga juga ada hierarki-hierarkinya. Oleh karena itu, pilihan alternatif untuk kaum feminis adalah: *Pertama*; *under-representation* (adanya perwakilan) perempuan dalam politik lokal dan nasional. *Kedua*; *de-gendering* tentang pembagian publik/privat. *Ketiga*, adanya pengalaman dari gerakan perempuan kontemporer dalam *participatory democracy* diharapkan dapat membangun sebuah visi dari lingkungan *grass root* dalam kehidupan demokrasi sehari-hari.

Maxine Molyneux dalam Nelson & Chowdhury (1994), mengemukakan adanya dua pendekatan untuk memahami gender *interest*, yaitu melalui *strategic gender interest* dan *practical gender interest*.

C. PEMBAHASAN

Transisi senantiasa memperkenalkan ketidakpastian. Demikian pula, transisi dari rezim otoritarian menuju 'sesuatu yang lain' yang penuh dengan

ketidakpastian. 'Sesuatu' itu menurut O'Donnel, Schmitter, dan Whitehead (1993), bisa jadi pemulihan demokrasi atau restorasi bentuk baru yang mungkin lebih buruk dari rezim otoritarian sebelumnya. Bisa jadi hasilnya pun *chaos* atau konfrontasi sengit dan meluas yang membuka peluang bagi rezim-rezim revolusioner untuk melakukan perubahan drastis dari kenyataan politik yang ada. Fenomena ini dapat terlihat setelah jatuhnya rezim Soeharto. Ketika berkuasa, Soeharto dapat diidentikkan dengan negara dan mengkooptasi kekuasaan melalui jalur ABG (ABRI-Birokrasi-Golkar) untuk melegitimasi kekuasaannya. Dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu ($\pm 90\%$), hanya dipakai sebagai alat kekuasaan untuk melegitimasi kekuasaan. Pemerintahan yang korup dan otoriter ini dikemas dengan demokrasi (pemilu). Pemilu yang sangat prosedural; dan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta kebijakan yang dihasilkannya selalu dikontrol Presiden. Struktur yang dibuat pada awal proses pembuatan keputusan akan mempunyai efek yang sangat dalam terhadap pilihan-pilihan kebijakan selanjutnya. Bahkan kedekatan individu terhadap rezim dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Pada masa itu juga ada indikasi kegagalan pembangunan model teknokrasi yang diterapkan. Ciri model teknokrasi adalah partisipasi ditekan, penanaman modal asing terjadi secara besar-besaran, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Hal ini pada akhirnya melahirkan *gap* yang semakin dalam antara yang kaya dan yang miskin; dan diprediksikan bahwa ini bersifat sementara. *Trickle down effect* yang diharapkan ternyata tidak terjadi karena sebagian besar golongan konglomerat non-pribumi yang masih dipertanyakan nasionalismenya.

Partisipasi yang ditekan dan ketimpangan sosial yang semakin dalam, berpotensi melahirkan ledakan partisipasi (demonstrasi dan gerakan mahasiswa) untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Masa transisi ini ternyata belum menjamin ke arah kehidupan yang demokratis. Bahkan yang terjadi sebaliknya, konflik horizontal dan vertikal semakin meluas. Apabila sebelumnya eksekutif lebih kuat dibanding lembaga negara lainnya, pada masa transisi yang terjadi sebaliknya. Legislatif lebih kuat tetapi ini tidak didukung oleh sistem pemerintahan yang ada (presidensial) dan peraturan yang berlaku. Tidak adanya partai politik yang mampu membentuk

pemerintahan sendiri, dan belum adanya koalisi tetap dalam parlemen menyebabkan pemerintahan labil. Masa transisi ini relevan dengan pendekatan transisi Potter (2001) yang menekankan adanya proses politik dan inisiatif elit dalam melakukan pilihan-pilihan untuk mengubah *authoritarian rule* ke demokrasi liberal. Menurut Potter, selama masa transisi bila *softliners* dan moderat berkuasa di legislatif, sementara *hardliners* berkuasa di eksekutif maka transisi bisa berjalan cukup aman. Masalahnya kelompok moderat tidak bersatu, sementara kelompok *opportunist* tidak mendapat suara. Lancar tidaknya perjalanan demokrasi tergantung pada elit, yaitu bagaimana elit dapat melakukan negosiasi dengan *softliners*.

Huntington (1991), mendefinisikan demokrasi sebagai berikut. *Pertama*, demokrasi itu sebenarnya bersifat *liberte*, *egalite*, dan *fraternite*. *Liberte* ini dalam *civil society* erat kaitannya dengan otonom, dan otonom berkaitan dengan konstitusi dan *citizenship*. Sebaiknya, konstitusi dan *citizenship* ini berdiri di atas, dan tidak bisa dikalahkan oleh *state*. *Egalite* artinya ada kesamaan kedudukan dalam hukum, kenyataannya undang-undang masih terlalu formal dan belum diterapkan secara sempurna. *Fraternite* artinya adanya toleransi (beradab) dan lebih mengacu pada hubungan horizontal. Di Indonesia, reformasi 'cukup' berhasil, tetapi ada masalah dengan *fraternite*. *Fraternite* yang sebelumnya bagus berubah menjadi konflik horizontal. *Kedua*, adanya pembatasan kekuasaan artinya ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif, kelompok kepentingan, dan tidak adanya keterlibatan militer. Dewasa ini keterlibatan militer dalam politik praktis sudah tidak ada. *Ketiga*, adanya stabilitas sistem politik yang mendukung proses demokrasi. *Keempat*, adanya dikotomi antara demokrasi-nondemokrasi dengan indikator: ada kejujuran dalam pemilu, pembatasan jumlah parpol, kebebasan pers. *Kelima*, Rezim nondemokratis tidak memiliki sistem pemilu yang kompetitif dan partisipasi voting yang menyeluruh. Ini sifatnya terlalu prosedural, bahkan dalam kenyataan ada rezim nondemokratis yang memiliki sistem pemilu 'kompetitif'. Ingat Golkar pada masa Orde Baru, sengaja diciptakan oleh rezim sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Di Indonesia, setelah rezim Soeharto dijatuhkan, arah dan visi reformasi selanjutnya belum terlihat jelas.

Rezim otoritarian yang ada tidak dapat disamakan satu sama lain, bahkan tidak ada rezim otoritarian dan kekuatan yang memperjuangkan demokrasi bersifat monolitik. Demikian halnya yang terjadi pada pecahnya Uni Soviet. Dalam kasus Uni Soviet ini peran Michael Gorbachev sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet dan sekretaris jenderal PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) sangat besar dalam menawarkan ide pembaharuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi atau dikenal dengan *glasnost* dan perestroika. Pembaharuan ini pada mulanya bertujuan mempercepat proses menuju komunisme. Akan tetapi, hal ini menghadapi kendala sistemik, di antaranya: laju pertumbuhan ekonomi yang menurun selama dua dekade dan tenaga kerja yang tidak dapat diserap lagi. Solusinya, Gorbachev menghendaki transformasi bersifat mendalam dan fundamental yang dilakukan melalui strategi akselerasi yang mendorong pertumbuhan 'intensifikasi' pembangunan ke arah modernisasi. Dengan kata lain, dibutuhkan peningkatan efisiensi, penekanan pada teknologi tinggi, dan pertambahan peran sektor jasa dalam proses produksi. Adanya pengangguran demi alasan efisiensi ini mempunyai implikasi politik di Uni Soviet, sebab negara dipandang melanggar kontrak sosial yang telah dibangunnya. Oleh karena itu, pembaharuan dalam bentuk transisi ke sistem pasar secara hati-hati mulai dilakukan. Di satu sisi, meningkatkan kebebasan perusahaan, di sisi lain hal ini berhadapan dengan sistem perencanaan terpusat. Proses industrialisasi yang dipercepat dan struktur masyarakat yang masih bersifat tradisional, dengan harapan dapat segera memasuki masyarakat komunis, yang terjadi malah sebaliknya. Konflik antaretnis terjadi sebagai akibat pecahnya Uni Soviet. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa jatuhnya suatu rezim sangat tergantung pada sifat alami rezim otoritarian yang dimiliki oleh negara tersebut; dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa demokratisasi melibatkan: berakhirnya rezim *authoritarian*, instalasi rezim demokrasi, dan konsolidasi rezim demokrasi.

Sedangkan masih berperangnya antara komunis dan liberalis menjadi isu utama di Amerika Latin, sehingga banyak upaya transformasi menuju demokrasi kadang dipengaruhi oleh pertentangan kedua ideologi tersebut; seperti kasus di Argentina, Brasil, Chile, dan Uruguay. Tetapi sebenarnya transisi di Amerika Latin sangat banyak dipengaruhi oleh tingkat kesadaran

politikus, aparatus, dan rezim militer. Selain itu, kondisi seperti terorganisasinya masyarakat sipil secara kuat, keaktifan organisasi sosial dan politik yang sangat tinggi, sistem partai yang cukup kuat dan representatif menjadi faktor penting bagi terwujudnya konsolidasi dari dalam; misalnya kasus Mexico, Peru, dan Venezuela. Bahkan siklus politik yang terjadi di Argentina dan Chile memperlihatkan bagaimana demokratisasi dapat terwujud melalui penggiliran antarrezim, walau harus dilakukan dengan kudeta. Ketika Jenderal Pinochet melakukan kudeta terhadap pemerintahan Salvadore Allende, siklus politik rezim terjadi sangat lambat dan berdarah. Keterlibatan militer pada rezim yang berkuasa dapat kita lihat di Peru, Chile, dan Uruguay, walau sebenarnya hampir semua transformasi rezim di Amerika Latin selalu mengikutkan keterlibatan militer. Dalam demokrasi umumnya tidak menginginkan keterlibatan militer, sebab tugas militer adalah menjaga keamanan negara. Selain itu, militer cenderung tidak demokratis. Keterlibatan militer ini pada akhirnya dapat melahirkan beberapa kemungkinan, yaitu: *Pertama*, militer setelah kudeta berusaha melenyapkan rezim sebelumnya dan membentuk suatu junta militer (rezim) seperti di Burma. *Kedua*, militer membentuk pemerintah darurat militer (bisa demokratis ataupun nondemokratis). *Ketiga*, militer bersifat moderat artinya menggunakan sipil untuk menjalankan pemerintahannya tetapi *policy maker* tetap di tangan militer. Hal ini seperti yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. *Keempat*, militer memperkuat rezim sipil. Kondisi seperti ini di Indonesia juga terjadi pada masa Orde Baru yang ditandai oleh masuknya militer sebagai pimpinan departemen. Rezim sipil sangat tergantung pada militer, sehingga rezim dalam memutuskan *policy* selalu meminta pertimbangan militer.

Berbicara tentang demokrasi kalau tidak membahas perempuan tidak ada artinya. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di bidang politik sangat kecil, sangat ironis bila dibanding dengan populasinya. Bila berbicara tentang demokrasi maka kita berbicara tentang: kedaulatan rakyat, persamaan politik, *public consultant*, dan *majority rule*. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa selama ini belum ada persamaan politik antara perempuan dan laki-laki padahal sebagai mayoritas populasi selayaknya perempuan mendapat tempat pada perwakilan politik secara

seimbang. Demokrasi yang dibangun berdasar pengalaman Barat yang tentunya juga menggunakan patokan Barat yang sangat *male stream* ternyata merupakan konsep yang utopis. Pada awalnya demokrasi memang netral, dan keterwakilan dalam parlemen lebih banyak diwakili oleh kelas menengah yang mayoritas adalah laki-laki. Secara universal memang struktur sosial yang ada sangat dikuasai oleh dominasi laki-laki; dan ini diaktualisasikan lebih lanjut dalam budaya. Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender merupakan seperangkat ciri-ciri khusus yang dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki oleh budaya yang melingkupinya (*nurture*) sedangkan jenis kelamin lebih mengacu kepada ciri-ciri biologis/alamiah (*nature*). Dalam konstruksi sosial, perempuan itu tempatnya di dalam rumah dan identik dengan kelembutan. Anak laki-laki tempatnya di luar rumah dan sejak kecil diajarkan kerja kompetisi, sedang perempuan diajarkan kerja kooperatif. Sedangkan feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan keadilan gender.

Dengan masuknya gender maka perlu dikonstruksi kembali teori-teori politik yang telah mapan. Misalnya, *citizenship* dalam demokrasi tidak melihat laki-laki atau perempuan, yang memenuhi persyaratan dapat dipilih/memilih. Perlu dipertanyakan kembali kontrak sosial yang ada, misalnya teori kontrak sosial J.J. Rousseau yang intinya menyatakan bahwa laki-laki mempunyai kebebasan untuk mempunyai properti dan diakui sebagai warga negara tetapi perempuan tidak diakui. Kontrak sosial Rousseau ini adalah seksual kontrak. Artinya, perempuan tidak memiliki hak kepemilikan kekayaan atau lainnya baik dalam keluarga atau masyarakat, termasuk juga tidak adanya kebebasan mengeluarkan pendapat bagi perempuan. Namun, seiring dengan perkembangan politik, perempuan mulai sedikit demi sedikit dimasukkan dalam ranah kegiatan politik. Bahkan isu gender sering kali menjadi posisi tawar yang kuat bagi dunia luar untuk melakukan tekanan politik pada suatu negara.

Tekanan dunia luar dalam bentuk Internasional melalui IMF juga berperan dalam politik di Indonesia. Hal ini mempengaruhi jumlah menteri perempuan, dan budaya yang bias gender mulai melonggar. Dengan adanya gerakan-gerakan internasional perempuan pada awal tahun 1960 sampai dengan 1990 telah melahirkan gerakan perempuan di setiap negara (yang

sifatnya *endogenous people*) yang mulai mempertanyakan kesetaraan gender. Sebagaimana dikatakan Huntington bahwa transisi rezim nondemokratis ke sistem demokratis sering kali melibatkan liberalisasi atau bagian-bagian demokrasi dalam sistem politik yang membuatnya tidak sepenuhnya demokrasi. Dengan kata lain, liberalisasi dapat mengakibatkan perempuan mengalami ketidakadilan. Sebagai contoh, pada budaya masyarakat tertentu perempuan sebagai pemimpin masih dilihat sebelah mata. Oleh karena itu, perempuan harus menunjukkan potensinya dahulu sebelum berkompetisi.

Pada model demokrasi liberal, *participatory* demokrasi, ataupun *civil republicanism* pada intinya menyatakan bahwa pembagian antara sektor publik dan privat ini justru memarginalkan perempuan. Mengapa? Sebab unit analisis terkecil sektor privat adalah keluarga. Faktanya di dalam keluarga juga ada hierarki-hierarkinya. Ketiga model di atas merupakan pilihan alternatif kaum feminis untuk: *Pertama, under-representation* (adanya perwakilan) perempuan dalam politik lokal dan nasional. Proses ini dapat dilakukan antara lain dengan memberikan komposisi tertentu (kuota) pada perwakilan perempuan baik dalam majelis (*assemblies*) di tingkat lokal ataupun nasional. Peningkatan proporsi perempuan ini tidak boleh dilihat sekedar jumlah. Akan tetapi, diharapkan melalui mekanisme yang ada perempuan dapat merumuskan kepentingannya dalam *policy* yang ada. *Kedua, de-gendering* tentang pembagian publik/privat. Gerakan perempuan, misalnya perlu menekankan hubungan antara *means* (cara) dan *ends* (tujuan), menyingkirkan hal-hal di luar perhatian politik, serta berusaha melarutkan perbedaan antara sektor publik dan privat. *Ketiga*, adanya pengalaman dari gerakan perempuan kontemporer dalam *participatory democracy* diharapkan dapat membangun sebuah visi dari lingkungan *grass root* dalam 'kehidupan demokrasi sehari-hari'.

Dalam demokrasi juga muncul isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, yaitu: kekerasan, hak-hak reproduksi, aborsi, maternal serta kesehatan anak, strategi persamaan, isu politik dan hukum. Bagaimana isu-isu tersebut? Adanya kuota terhadap perempuan untuk duduk dalam parlemen diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan yang dihasilkan. Bahkan di Skandinavia, adanya kuota bagi perempuan duduk dalam parlemen memberikan pengaruh terhadap *policy* yang

dihasilkan, yaitu lebih memperhatikan masalah *family care, child care*, dan maternal. Selanjutnya, bagaimana ada proses eksklusi perempuan dalam politik formal? Chowdury menjawab ini dengan mengaikannya pada patriarki dan fraternalisme, serta partai politik dan *civil society*. Pada mulanya mereka yang berorientasi budaya berargumentasi bahwa ada diferensiasi peran (*division of labor*) antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan perbedaan *nature* biologis, melainkan disebabkan faktor budaya. Budaya berinteraksi dengan faktor biologis, dan menjadi terinstitusionalisasi. Institusi ini berfungsi sebagai wadah sosialisasi, di mana kebiasaan dan norma yang berlaku akan diwariskan secara turun menurun. Keadaan ini telah menciptakan institusi di mana *division of labor* menjadi suatu norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Seiring dengan penemuan teknologi modern maka *division of labor* ini dapat berubah. Perempuan dapat menghilangkan kendala biologis yang menghambat dirinya untuk terjun dalam sektor-sektor yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.

Tentang partai politik dan *civil society* dapat dijelaskan bahwa umumnya dalam masa transisi demokrasi, rezim penguasa selalu merekrut figur yang dianggap tepat dari wadah partai politik. Figur yang dianggap kuat untuk melawan rezim militer sebelumnya ini biasanya 'laki-laki', oleh karena itu *civil society* pada mulanya tidak kondusif terhadap permasalahan gender. Sebab semua *policy* yang dihasilkan sangat bias gender, bahkan cenderung menguntungkan pada kepentingan laki-laki. Selanjutnya, bagaimana kehidupan politik setiap hari? Maxine Molyneux dalam Nelson & Chowdhury (1994), mengemukakan adanya dua pendekatan untuk memahami ketertarikan gender (*gender interest*), yaitu: *strategic gender interest* dan *practical gender interest*. Dalam *strategic gender interest*, gerakan-gerakan perempuan yang ada berusaha mencoba berbagai alternatif untuk memberdayakan perempuan. Kata 'alternatif' di sini mengindikasikan bahwa hal ini ada kaitannya dengan masalah *policy*. Oleh karena itu, *strategic gender interest* tidak hanya mengupayakan persamaan kesempatan saja pada saat mengikuti proses kebijakan, tetapi juga memikirkan dampaknya. Sedangkan *practical gender interest*, lebih mencoba memberdayakan perempuan dengan kesempatan yang ada di depan mata. Oleh karena itu, ideologi gender dan tindakan potensial yang ada sebaiknya

menghilangkan bias gender. Dalam hal ini pendekatan pembangunan tidak lagi menggunakan WID (*Woman In Development*) tetapi GAD (*Gender And Development*).

D. KESIMPULAN

Apabila berbicara tentang demokrasi maka kita berbicara tentang: kedaulatan rakyat, persamaan politik, *equality*, *public consultant*, dan *majority rule*. Dengan masuknya gender dalam kajian politik, maka teori politik yang sudah mapan perlu dikonstruksi kembali. Contohnya, tentang *citizenship* dalam demokrasi tidak melihat perbedaan laki-laki atau perempuan, mereka yang memenuhi syarat dapat dipilih/memilih; teori kontrak sosial yang ternyata seksual kontrak ini perlu dibongkar kembali. Tersosialisasinya gender ini juga didukung oleh IMF agar Dunia Ketiga memperhatikan kesetaraan gender dalam berbagai bidang, bahkan ini perlu diwujudkan dalam bentuk pendekatan *Gender And Development* (GAD).

Berbicara tentang gerakan perempuan, berarti berbicara tentang patriarki dan fraternalisme, serta partai politik dan *civil society*. Artinya, faktor budaya memegang peran penting dalam diferensiasi peran (*division of labor*) antara laki-laki dan perempuan, bahkan rezim penguasa pada masa transisi demokrasi selalu merekrut figur laki-laki dari wadah partai politik karena dianggap kuat. Oleh karena itu, *civil society* pada mulanya tidak kondusif terhadap permasalahan gender. Hal ini dapat dilihat pada rezim-rezim militer Amerika Latin. Model-model demokrasi, baik demokrasi liberal, *participatory* demokrasi, ataupun *civil republicanism*; pada intinya menyatakan bahwa pembagian antara sektor publik dan privat ini justru memarginalkan perempuan. Terakhir, untuk mengatasi isu-isu tentang *gender interest*, Maxine Molyneux menawarkan adanya dua pendekatan, yaitu: *strategic gender interest* dan *practical gender interest*. Dalam *strategic gender interest*, gerakan-gerakan perempuan yang ada berusaha mencoba berbagai alternatif (*policy*) untuk memberdayakan perempuan. Hal ini tidak hanya mengupayakan persamaan kesempatan saja pada saat mengikuti proses kebijakan, tetapi juga memikirkan dampaknya; sedangkan *practical gender interest* lebih mencoba memberdayakan perempuan dengan kesempatan yang ada di depan mata.

DAFTAR PUSTAKA

- Huntington, Samuel P. (1991). *The Third Wave Democratization In The Late Twentieth Century*. London: University of Oklahoma Press.
- Nelson, Barbara J. & Najma Chowdhury (ed). (1994). *Women and Politics Worldwide*. London: Yale University Press.
- O'Donnel, Gullermo; Phillipe Schmitter, and Laurence Whitehead. (1993). *Transisi Menuju Demokrasi Jilid 4*. Jakarta: LP3ES.
- Phillips, A. (1991). *Engendering Democracy*. Great Britain: Polity Press.
- Potter, David; David Goldblatt, Margaret Kiloh, Paul Lewis (ed). (2001). *Democratization*. USA: The Open University.